

ABSTRAK

PENGARUH PENGELAMAN DEWAN (DPRA) TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (apbd) PEMERINTAH ACEH

Oleh : RUSMAN, SE,MSi

**DOSEN TETAP STIES
BANDA ACEH**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengellaman dewan (DPRA) tentang Angaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Pemerintah Aceh Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatip, yaitu mengetahui pengaruh variable independen dengan variable dependen. Sampel penelitian ini sebanyak 39 orang responden, dengan menggunakan methoded sensus, yaitu semua populasi yang memenuhi kreiteria ikut diteliti. Analisa data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dengan alat bantu analisis melalui SPSS 17. Dara hasil analisa selanjutnya dirumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalaman Dewan (DPRA) tentang Anggaran berpengaruh positip terhadap Pengawas Keuangan Daerah (APBD) Pemerintah Aceh . Hasil uji- t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 6.534 > \text{tabel } (2.8451)$ dengan koefisien sebesar 0.768 dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Disamping itu, hasil uji R pada *Model Summary* menunjukkan sebesar (R square) : 0.536. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh dipengaruhi faktor pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran sebesar 53, 6 %, relative kuat. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Jadi pengaruhnya relative kuat.

Kata Kunci : Pengalaman Dewan (DPRA), Pengawas keuangan daerah (APBD).

1. Pendahuluan

Indonesia memulai era baru dalam kehidupan masyarakatnya yang menyebabkan terjadinya untuk mewujudkan otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan masyarakat dalam rangka pelaksanaan reformasi. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab Pemerintah Pusat memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemereintah Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tersebut, memberikan dampak positif kepada pihak legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu disamping sebagai pihak yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. juga dituntut pengawasan keuangan daerah agar pemerintah daerah

berekewajiban mewujudkan *good governance* dalam melaksanakan tata pemerintahannya. Hal ini merupakan salah satu aspek penting bagi DPRD agar terjadi manajemen pengawasan keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007).

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran, Dengan demikian .DPRD mempunyai hak untuk mengontrol dalam pelaksanaan tata pemerintahan untuk mewujudkan konsep *value for money* atau lebih dikenal dengan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), transparan dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007).

Untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD banyak faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan tentang mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban (Dewi, 2011). Hal tersebut diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni (2007) dan Widyaningsih dan Pujirahayu (2012), meunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas dapat dipaahami bahwa peran DPRD sebagai legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dewan tentang anggaran. Semakin tinggi pengetahuan DPRD tentang anggaran maka semakin tinggi tingkat pengawaasan APBD oleh DPRD. Namun pada kenyataanya masih terjadi banyak kasus lemahnya pengawasan keuangan daerah oleh dewan (DPRD), salah satunya adalah di DPRD Aceh.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah salah ssatu DPRD yang dengan lahirnya UU No.11 Tahun 2006, maka nama DPRD dirubah menjadi DPR Aceh (DPRA). DPRA dalam mengawasi pelaaksanaan anggaran oleh Pemerintah Aceh adalah melalui pansus yaitu DPRA melakukan pengecekan secara langsung kepada objek proyek untuk menilai prlaksanaan proyek tersebut. Pansus ini dilkukan setiap tahun. Disamping itu, DPRA mengadakan kunjungan kerja kepada masyaraakat (reses) untuk mengetahui sejauh mana pembangunan proyek yang telah dilaksanakan. Selain itu, pengawasan DPRA dilakukan dengan menilai laporan pertanggungjawaban Pemerintah Aceh yang disampaikan setiap tahun..

Namun, menurut penulis bahwa fungsi pengawasan keuangan APBD Aceh oleh anggota DPRA Aceh selama ini masih rendah atau relatif rendah. Hal ini merupakan fenomena atau permasalahan bagi anggota DPRA selama ini. Fakta lapangan menunjukkan bahwa selama ini banyak terjadi penyimpangan (korupsi) penggunaan dana keuangan APBD dilingkungan Pemerintah Aceh, seperti terjadinya kasus korupsi Gubernur Aceh Abdullah Putih, sorotan penggunaan dana rumah tangga Pemerintah Aceh, dan sebagainya. Hasil audit laporan pertanggung jawaban keuangan Gubernur Aceh selama ini bersipat Opini WDP yaitu wajar dengan pengecualian, artinya masih terjadi penyimpangan penggunaan dana oleh eksekutif dalam hal ini Pemerintah Aceh, terkecuali Rendahnya pengawasan oleh DPRA diperkirakan dipengaruhi rendah pengetahuan DPRA tentang anggaran baik sejak penyusunan anggaran maupun dalam pengawasan pelaksanaan anggaran. Rendahnya pengetahuan Anggota DPRD Aceh terlihat dalam pengesahan APBD Aceh oleh anggota dewan yaitu rata-rata terlambat dan tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya, sehingga waktu pelaksanaan oleh eksekutif Pemerintah Aceh relative pendek. Kejadian ini rata-rata terjadi setiap tahun di Aceh. Rendahnya pengetahuan dewan diprediksi karena terkendala pada tingkat pendidikan anggota dewan dan rendahnya pengalaman dibidang anggaran sebagai anggota dewan selama ini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Sopanah dan Wahyudi (2007) dan oleh Widyaningsih dan Pujirahayu (2012), menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah,

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti berkeinginan melakukan penelitian ilmiah dengan diberi judul tersebut diatas.

2. Landasan Teoritis

2.1 Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.

2.2 Pengawasan Anggaran

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 dalam Nurul Fitri Amalia (2013:31) tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencanadan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Kepres Nomor 74 tersebut mrnrgaskan ruang lingkup pengawasan membedakannya menjadi dua yaitu :1) pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan 2) pengawasan eksternal. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang telah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal departemen, lembaga Negara atau BUMN termasuk pengawasan dari lembaga khusus pengawasan.

Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi) (Sri Rustiyaningsih, 2014:20)

Selanjutnya Mulyana (2010) dalam Sri Rustiyaningsih (2014:16) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah sebagai berikut :

- (1) Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan.
- (2) Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan.
- (3) Menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan

2.3 Inddikator Pengawasan Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah pengawasan terhadap keuangan dijelaskan yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dimaksudkan bukanlah terkait dengan pemeriksaan tapi lebih kepada pengawasan untuk menjamin kualitas terhadap sasaran program yang telah ditetapkan dalam APBD.

Hal ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dalam Sri Rustiyaningsih (2014:18) yang menyatakan bahwa untuk menjamin

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Indikator pengawasan oleh DPRD dilakukan sejak tahap awal sampai pertanggung-jawaban anggaran. Ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, maka pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.

Pengawasan merupakan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Disamping itu, variabel pengawasan keuangan daerah diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Sopanah dan Wahyudi (2007: 10) yaitu instrumen sebagai indikatornya yang mengukur pengawasan keuangan daerah oleh DPRD adalah : pengawasan saat penyusunan, pengawasan saat pengesahan, pengawasan saat pelaksanaan dan pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran

Menurut Roseptalia (2006) **dalam** Widyaningsih, A. dan Pujirahayu, I (2012:22) **bahwa** Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD penting dilakukan untuk memastikan agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan DPRD dan masyarakat harus sudah diukur sejak tahap persiapan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Dalam tahap ratifikasi anggaran, peran DPRD hendaknya tidak lagi sebagai "tukang stempel" saja, namun harus benar-benar memainkan fungsinya sebagai pemegang hak budget. Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran harus diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan.

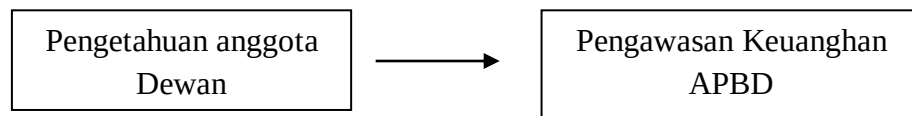
2.4. Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran dan dapat indikator bahwa anggota dewan mengetahui tentang tata cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran dan kemampuan mendeteksi serta identifikasi pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudoyono, 2002). **dalam** Widyaningsih, A. dan Pujirahayu, I (2012:26) . Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi pengawasan. Karena memberi kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

2.6 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono, (2008:47) mengatakan bahwa kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teori pertautan/hubungan antara variable independen dan dependen. Pertautan antar variable dirumuskan ke dalam bentuk pradigma penelitian. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri, maka kerangka konseptual mengemukakan deskriptif teori untuk masing-masing variable dan tidak perlu membuat pradigma penelitian.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dalam bentuk diagram sbb :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis Penelitian

Ho = Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan Keuangan APBD Aceh.

Ha = Pengetahuan Anggota Dewan berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan APBD Aceh.

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono, (2014:148) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek-objek penelitian yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek peneliti itu. .

Berdasarkan teori tersebut, maka populasi penelitian mengacu pada anggota DPR Aceh berjumlah 81 orang, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Unsur Pemimpin Dewan. Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
2. Sekretaris Dewan. Perwakilan Rakyat Aceh
3. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Dari kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah populasi yang memenuhi syarat tersebut berjumlah 39 orang, terdiri dari :

NO	UNSUR/ELEMEN	JUMLAH
1	Unsur pimpinan	4
2	Sekretaris dewan	1
3	Anggota Banggar	34
	Jumlah	39

Sumber : Sekretariat DPR Aceh Tahun 2016

3.2 Metode Pengumpulan Data

1). Data primer

a. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan dengan menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden dsb. Skala pengukuran dengan *skala likert*, yaitu ini menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam rentang nilai 1 sampai 5..

2) Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya bersal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Tabel III-2
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item
Independen						
1	Pengetahuan anggota DPR Aceh Tentang anggaran	Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yaitu mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran anggaran. (Yudojono B (2002: 11)	Mengetahui tata cara pelaksanaan APBD	1-5	Interval	A1
			Memiliki pemahaman penyusunan APBD berdasarkan peraturan yang terkait	1-5	Interval	A2
			Mampu mendeteksi dan mengidentifikasi pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran	1-5	Interval	A3

Dependen						
2	Pengawasan keuangan APBD Aceh	Pengawasan keuangan APBD yang dilakukan oleh Anggota dewan adalah penting dilakukan untuk memastikan agar anggaran yang disusun benar benar dijalankan agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskandan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar benar dapat dipertanggungjawabkan. (Roseptalia, (2006: 10)	Pengawasan saat menyusun	1-5	Interval	B1
			Pengawasan saat pengesahan	1-5	Interval	B2
			Pengawasan saat pelaksanaan	1-5	Interval	B3
			Pengawasan saat pertanggungjawaban	1-5	Interval	B4

3.4. Uji Validitas dan Reabilitas (Kehandalan)

Uji Validitas

Uji ini dimaksudkan untuk menguji apakah pengetahuan anggota dewan dan pengawasan keuangan APBD betul-betul valid. Dengan menggunakan formula korelasi *Product Moment* dari *Pearson*, yaitu nilai korelasi (r -hitung) lebih besar dibandingkan dengan nilai (r -tabel) pada tingkat keyakinan 95% bahwa item-item pertanyaan/pernyataan tersebut valid. (Umar, 2004:103).

Uji Reabilitas (Kehandalan)

Untuk mengukur Reabilitas (kehandalan) kuesioner, digunakan uji reabilitas. Umumnya pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *crochbach alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variable yang ada. Uji ini dimaksud untuk mengukur bahwa instrument yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga dapat dipakai dengan baik kondisi yang berbeda-beda. Ukuran reabilitas dianggap handal berdasarkan *cronbach alpha* sebesar 0,60 (Malhotra, 2005).

3.5. Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, hal ini dapat dilakukan dengan melihat sebaran *standardized* pada kurva P-P plots, bila *standarized residual* berada pada kisaran garis normal, maka data mempunyai distribusi normal (Santoso, 2007:258). Apabila data berdistribusi normal,

maka digunakan statistik parametrik, sebaliknya apabila tidak berdistribusi normal, maka digunakan statistik non-parametrik.

3.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah variasi data yang digunakan untuk membuat model tidak konstan atau yang menunjukkan semakin besarnya variasi seiring dengan membesarnya nilai X dan Y. Heteroskedastisitas terjadi bila variasinya tidak konstan, sehingga seakan-akan ada beberapa kelompok data yang mempunyai besaran error yang berbeda-beda. (Gouzali,2005:11).

3.6 Metode Analisis Data

Instrumen yang digunakan untuk dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara pengetahuan anggaran anggota dewan sebagai variabel independen dengan Pengawasan Keuangan APBD sebagai variabel dependen adalah regresi linier sederhana. Gujarati (2006: 130) regresi linier sederhana dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y= Pengawasan Anggaran Oleh DPRD
a= konstanta
X= Pengetahuan Anggota Dewan atas Anggaran
b = koefisien regresi untuk variabel X
e = *Error term*

3.7 Rancangan Pengujian Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka menerima H_a dan menolak H_o pada tingkat signifikansi 5%

Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$, maka menolak H_a dan menerima H_o pada tingkat signifikansi 5% (lima persen).

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
PGNWS KEU DRH	4.1821	0.34403	39
PENGLMN DWN ANGRN	3.8879	0.32801	39

Sumber : Data primer (diolah), 2015

Dari tabel 4.2 hasil pengukuran statistik deskriptif yaitu variabel nilai pengalaman dewan tentang anggaran (mean) sebesar 3.8879. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalaman dewan yaitu relative baik., sedangkan nilai pengawasan keuangan daerah 4.1821, berarti relative baik.

4.4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Hasil Uji Validitas

Nilai probabilitas dikatakan signifikan jika $p < 0,05$. Hasil uji validitas data pada tabel 4-3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Data

a. Variabel Pengetahuan Dewan ttg Anggaran (X)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kritis (r_{tabel})
B1	0.356	0.320
B2	0.697	0.320
B3	0.569	0.320
B4	0.794	0.320
B5	0.682	0.320
B6	0.338	0.320
B7	0.775	0.320
B8	0.339	0.320
B9	0.591	0.320
B10	0.548	0.320
B11	0.704	0.320
B12	0.462	0.320

b. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

Kode	Koefisien Korelasi (r_{hitung})	Nilai Kritis (r_{tabel})
B1	0.558	0.320
B2	0.594	0.320
B3	0.709	0.320
B4	0.709	0.320
B5	0.417	0.320
B6	0.631	0.320
B7	0.576	0.320
B8	0.656	0.320
B9	0.721	0.320
B10	0.421	0.320

Sumber: Data Primer 2015, (diolah)

Dari penyajian validitas data diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh masingmasing item dari variabel pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) berada diatas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi > 0.320 , sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

Hasil Uji Reabilitas

Dalam tabel 4.4 disajikan hasil uji reabilitas.

Tabel 4 -4
Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Rata-rata	Jumlah Item	Nilai Alpha	Keandalan
1	Pengalaman dewan		12	0.863	Handal
2	Pengawasan keuangan daerah		10	0.871	Handa

Sumber: Data Primer 2015 (diolah)

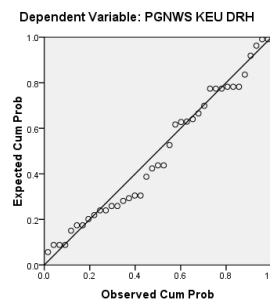
Berdasarkan reliability terlihat bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* untuk masing-masing variable berada diatas adalah 0.50. Dengan demikian pengukuran reliabilitas bahwa kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini sangat baik dan layak untuk digunakan. (Ghozali, 2006

4.5. Hasil Uji Normalitas

asumsi normalitas, sebagai berikut :

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tampilan grafik normal *probability plot* pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.6. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4 - 5
Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.197	0.458		2.612	0.013
	PENGLMN DWN ANGRN	0.768	0.117	0.732	6.534	0.000

a. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.197 + 0.768 X + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, bahwa : nilai konstanta sebesar 1.197, artinya faktor pengalaman dewan tetap, maka pengawasan keuangan daerah (ABPD) Aceh mengalami kenaikan sebesar 1.197 . Pengalaman dewan (DPRA)) sebesar sebesar 0.768 yang berarti akan mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh sebesar 0.768

4.7. Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Hasil uji Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4 - 6
Hasil Analisis Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.732 ^a	0.536	0.523	0.23756	0.447

a. Predictors: (Constant), PENGLMN DWN ANGRN

b. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

Sumber : Data primer (diolah), 2015

Dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa : a) nilai koefisien korelasi/hubungan (R) : 0.732^a, relative kuat dan pengaruh (R Square) = 0.536. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh dipengaruhi faktor pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran sebesar 53, 6 %, relative kuat. Sementara sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Jadi pengaruhnya relative kuat.

4.6.2 Uji Secara Parsial.

Hasil parsial pada tabel sbb :

Tabel 4 -7
Pengujian Hipotesis secara Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.197	0.458		0.013
	PENGLMN DWN ANGRN	0.768	0.117	0.732	0.000

a. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

Berdasarkan table 4.7 diketahui bahwa pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran mempunyai $t_{hitung} = 6.534 > \text{tabel } (2.8451)$ dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima bahwa variable pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran secara parsial berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Aceh .

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Secara parsial, pengaruh yang positif pengalaman dewan (DPRA) tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pemerintah Aceh . Hasil uji $t_{hitung} = 6.534 > \text{tabel } (2.8451)$ dengan koefisien sebesar 0.768. Hal ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya terjadi peningkatan pengalaman dewan (DPRA) dibidang anggaran akan mempengaruhi tingkat pengawasan keuangan daerah (APBD) Pemerintah Aceh.
2. Pengaruh variabel pengalaman dewan (DPRA) terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pemerintah Aceh relative kuat, hasil uji R pada *Model Summary* yaitu sebesar 0.536^a atau 53,6 % ,> 50 % jadi relative kuat.

5.2. Saran

1. Disarankan kepada Pengawas Pemilu Aceh, perlu ditetapkan kriteria atau persyaratan secara khusus bagi calon anggota DPRA seperti memenuhi persyaratan atau pengalaman dibidang anggaran, memiliki pendidikan serendahny strata 1 (sarjana), dan sebagainya
2. Disarankan kepada Partai Politik di Aceh, bahwa setiap mencalonkan anggota DPR dari partainya sebaiknya ditetapkan secara selektif Setelah menjadi anggota DPRA ternyata kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah APBD Aceh
3. Disarankan kepada eksekutif Pemerintah Aceh, agar mengusulkan pandangan umum kebijakan anggaran dan pendapatan kepada DPRA Aceh lebih cepat sehingga anggota DPRA masih banyak waktu dalam penyusunan anggaran mengingat lemahnya pengetahuan dewan dibidang anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Coryanata, I. (2007.) Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan

- Pengawasan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, (Online), Hlm. 1-24, (<http://eprints.undip.ac.id/15180/1/ASPP>, diakses 28 April 2013).
- David. (2006.) *Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government Nonprofit Social Service Contracting Relationship* (Online). (<http://oied.ncsu.edu>, diakses 17 Maret 2014)
- Donaldson, L. dan Davis, J. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns* (Online). Vol 16 No.1 (<http://faculty.wvu.edu/dunnc3/rprnts.stewardshiporagency.pdf> di akses 14 Maret 2014)
- Ghozali, I. (2009.) *Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim dan Abdullah. (2006.) *Hubungan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah*. (Online), Vol 2 No 1 hlm.53-64. (http://www.academia.edu/1798363/halim_dan_abdullah, diakses 9 Maret 2014)
- Halim, A. (2012.) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Juliastuti, A. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. (Online), (<http://unp.ac.id>, diakses 29 April 2013)
- Mappong, S. (2013) *Tujuh Daerah Di Sulsel Raih WTP*, (Online) (<http://antarasulsel.com> diakses 10 November 2013)
- Mardiasmo. (2004.) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Pramono, A.H. (2002), *Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Tesis S2 Tidak di Publikasikan, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Priyatno, D. (2013). *Mandiri belajar analisis data dengan SPSS*. Jakarta: PT Buku Seru
- Raharjo, E. (2007). *Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. (Online), Vol. 2 No.1. (<http://penafokus.ac.id>, diakses 10 Februari).
- Sri Rustiyaningsih, (2014), *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada Anggota DPD di Kabupaten Landak Kalimantan Barat)*, *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* Vol.02, Edisi Februari 2014.
- Sopannah, dan Isa, W. (2007.) *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. (Online), (<http://umm.ac.id>, diakses 29 April 2013).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyanto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwardjono. (2010.) *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Werimon, S. (2007.) *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*, (Online) Hlm. 1-22, (<http://eprints.undip.ac.id/15180/1/ASPP>, diakses 28 April 2013)
- Widyaningsih, A. dan Pujirahayu, I. (2012.) *Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah tentang Anggaran terhadap Pengawasan Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating*. (Online), Vol .2, No.1, (<http://bakrie.ac.id>, diakses 30 April 2013).
- Yahya, I. (2006.) *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. (online), (<http://repository.usu.ac.id>, diakses 15 Mei 2013)
- Yudoyono, B. (2002.) *Optimalisasi Peran DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (online), (<http://www.bangda.depdagri.go.id>, diakses 30 April 2013)

LAMPIRAN I : KUESIONER

Lampiran 1: Kuesioner

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Anggota DPRA Aceh

di Tempat

Hal : Permohonan untuk menjadi responden

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi pada STIES Banda Aceh,, maka peneliti mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner dan memilih jawaban pada kolom yang telah disediakan.

Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluan untuk menyusun skripsi yang berjudul, **“PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) ACEH**. Pengisian kuesioner ini mohon diisi seobjektif mungkin, sebagaimana penelitian ilmiah, dan kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang merugikan dan sebelum mengembalikan kuesioner ini, Bapak/Ibu dimohon dapat memeriksa kembali semua jawaban dalam tiap bagian, peneliti berharap tidak ada butir/pertanyaan yang terlewat atau tidak terjawab. Atas kesediaannya dalam mengisi kuesioner ini, diucapkan banyak terima kasih.

Banda Aceh 2016

Yang membuat pernyataan,

KUESIONER
PENGARUH PENGETAHUAN DPRA TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) ACEH

I. IDENTITAS RESPONDEN :

Nama :(boleh tidak diisi)
 Nomor Responen :
 Jabatan Responden :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan (coret yang tidak perlu)
 Umur : ----- tahun
 Pendidikan Terakhir :
 Masa Kerja :tahun Bulan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Bapak/Ibu dimohon memilih alternative jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan cara memberi tanda V pada kolom yang Bapak/Ibu anggap mewakili jawaban Bapak/Ibu.					
PERNYATAAN POSITIF			PERNYATAAN NEGATIF		
STS	1	Sangat tidak setuju	SS	1	
TS	2	Tidak Setuju	S	2	
KS	3	Kurang Setuju	KS	3	
S	4	Setuju	TS	4	
SS	5	Sangat Setuju	STS	5	



III. Pernyataan berikut ini berkaitan dengan Pengaruh Pengetahuan DPRA Aceh tentang Anggaran terhadap Peengawasan Keuangan APBD Pemerintah Aceh.

UNSUR PENGETAHUAN DEWA ATAS ANGGARAN

No.	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Apakah Anda setuju bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengetahui pentingnya pengetahuan tentang anggaran dalam penyusunan APBD Aceh.					
2	Apakah Anda setuju bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyusun anggaran APBD Aceh telah mengetahui secara sempurna tentang mekanis penyusunan anggaran mulai perencanaan/d pertanggungjawaban anggaran					
3	Apakah anda setuju bahwa anggota DPRA dalam menyusun anggaran telah memahami peraturan - peraturan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran.					
4	Apakah anda setuju bahwa DPRA belum mampu mensyahkan anggaran APBD Aceh tepat waktu atau masih terjadi ketidak sesuai dengan waktu,					
5	Apakah anda setuju bahwa DPRA telah mampu menetapkan proritas sasaran anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh, karena pengalaman anggota DPRA Aceh tentang anggaran.					
6	Apakah anda setuju bahwa DPRA telah mempunyai pengalaman yang memadai sehingga penyusunan anggaran APBD Aceh belum menggambarkan visi pembangunan daerah .					
7	Apakah anda setuju bahwa akibat rendahnya pengalaman DPRA tentang anggaran, sehingga tidk mampu mengindentifikasi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.					
8	Apakah anda setuju bahwa penyusunan dan penetapan perhitungan dalam anggaran APBD Aceh adalah telah sesuai dengan standar yang ada.					
9	Apakah anda setuju bahwa pengalaman DPRA bersama Pemerintah Aceh dalam menyusun APBD, membahas secara prioritas tentang plafon anggaran sementara.					
10	Apakah anda setuju bahwa jmlah angaran yang telah disetujui dan disyahkan harus					



	dimanfaatkan/dielisasikan oleh eksekutif secara ekonomis, efektif dan efisien.					
11	Apakah anda setuju bahwa mekanis penyusunan anggaran oleh DPRA, diawali Pemerintah Aceh menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRA.					
12	Apakah anda setuju bahwa pembahasan anggaran oleh DPRA bersama eksekutif Pemerintah Aceh bertujuan untuk menghasilkan anggaran yang realistis dan menghindari terjadinya pemborosan dalam anggaran.					

UNSUR PENGAWASAN KEUANGAN APBD ACEH

No.	Item Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Apakah anda setuju bahwa DPRA telah melakukan pengawasan selama penyusunan anggaran APBD Aceh.					
2	Apakah anda setuju bahwa DPRA dalam penyusunan anggaran telah dilakukan pengawasan melalui pembahasan anggaran dan dalam pengusulan APBD setiap tahun.					
3	Apakah anda setuju bahwa dalam pengessahan anggaran oleh DPRA juga dilakukan pengawasan yaitu dengan membuat peraturan pengesahan anggaran oleh DPR.					
4	Apakah anda setuju bahwa Anggota DPRA telah melakukan pengawas dalam pelaksanaan anggaran APBD oleh eksekutif Pemeritah Aceh.					
5	Apakah anda setuju bahwa Anggota DPRA dalam melakukan pengawas pelaksanaan anggaran APBD dilakukan melalui pansus atau pengecekan langsung ke objek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.					
6	Apakah anda setuju bahwa dalam pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Pemereintah Aceh , DPRA juga melakukan pengawasan melalui reses yaitu melakukan peninjauan langsung kepada masyaraakat.					
7	Apakah anda setuju bahwa dalam pengawasan					

	pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Aceh, Pihak DPRA juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Aceh, termasuk faktor-faktor dan alasan tumbuhnya revisi APBD.					
8	Apakah anda setuju bahwa dalam pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Aceh, DPRA meminta keterangan/penjelasan melalui pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan oleh Gubernur Aceh					
9	Apakah anda setuju bahwa Anggota DPRA selalu mengusut dan menindaklanjuti apabila terjadi kegagalan dalam LPJ APBD Aceh.					
10	Apakah anda setuju bahwa DPRA Anggota dewan aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Pemerintah Aceh jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan					

Banda Aceh, April 2017

LAMPIRAN II : HASIL SPSS RELIABILITY

```
RELIABILITY
/VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12
/SCALE ('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=SCALE ANOVA
/SUMMARY=TOTAL MEANS

/ICC=MODEL (MIXED) TYPE (CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	39	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	39	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.863	0.866	12

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.934	3.615	4.410	.795	1.220	.065	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BUTIR 2	42.8974	22.673	0.356	0.700	0.864
BUTIR 2	42.9744	20.131	0.697	0.762	0.841
BUTIR 3	43.4872	21.256	0.569	0.861	0.851
BUTIR 4	43.3590	19.815	0.794	0.871	0.834
BUTIR 5	43.5897	21.933	0.682	0.876	0.847
BUTIR 6	43.5385	23.887	0.338	0.669	0.879
BUTIR 7	43.2564	18.827	0.775	0.929	0.834
BUTIR 8	43.2821	23.260	0.339	0.742	0.866
BUTIR 9	43.2821	21.260	0.591	0.904	0.849
BUTIR 10	43.3590	21.710	0.548	0.904	0.852
BUTIR 11	42.7949	21.799	0.704	0.721	0.846
BUTR 12	43.4359	21.989	0.462	0.672	0.858

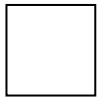
Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
47.2051	25.325	5.03242	12

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	80.197	38	2.110	8.801	.000
Within People Between Items	27.972	11	2.543		
Residual	120.778	418	.289		
Total	148.750	429	.347		
Total	228.947	467	.490		

Grand Mean = 3.9338



LAMPIRAN RELIABILITY VARIABEL Y

```
RELIABILITY
/VARIABLES=B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=SCALE ANOVA

/SUMMARY=TOTAL MEANS.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	39	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	39	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
0.871	0.877	10

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	4.182	3.667	4.564	.897	1.245	.117	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
BUTIR 1	37.3590	9.815	0.558	.	0.861
BUTIR 2	37.2564	9.722	0.594	.	0.859
BUTIR 3	37.5385	9.623	0.709	.	0.851
BUTIR 4	37.5385	9.623	0.709	.	0.851
BUTIR 5	37.3846	10.243	0.417	.	0.872
BUTIR 6	37.3846	8.822	0.631	.	0.858
BUTIR 7	37.5897	10.090	0.576	.	0.860
BIUTI 8	38.0513	9.629	0.656	.	0.854
BUTIR 9	38.1282	9.536	0.721	.	0.849
BUTIR 10	38.1538	10.134	0.421	.	0.873

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
41.8205	11.835	3.44026	10

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	44.974	38	1.184		
Within People					
Between Items	40.997	9	4.555	29.901	.000
Residual	52.103	342	.152		
Total	93.100	351	.265		
Total	138.074	389	.355		

Grand Mean = 4.1821

LAMPIRAN III : SPSS HASIL UJI REGRESION

```

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT PKD
  /METHOD=ENTER PDA
  /SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED) (*ZPRED ,PKD)
  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID)

  /CASEWISE PLOT(ZRESID) ALL.

```

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PGNWS KEU DRH	4.1821	.34403	39
PENGLMN DWN ANGRN	3.8879	.32801	39

Correlations

		PGNWS KEU DRH	PENGLMN DWN ANGRN
Pearson Correlation	PGNWS KEU DRH	1.000	.732
	PENGLMN DWN ANGRN	.732	1.000
Sig. (1-tailed)	PGNWS KEU DRH	.	.000
	PENGLMN DWN ANGRN	.000	.
N	PGNWS KEU DRH	39	39
	PENGLMN DWN ANGRN	39	39

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
-------	----------------------	----------------------	--------

1	PENGLMN DWN ANGRN ^a		. Enter
---	-----------------------------------	--	---------

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.732 ^a	.536	.523	.23756	.447

a. Predictors: (Constant), PENGLMN DWN ANGRN

b. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.409	1	2.409	42.694	.000 ^a
	Residual	2.088	37	.056		
	Total	4.497	38			

a. Predictors: (Constant), PENGLMN DWN ANGRN

b. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.197	.458		2.612	.013
	PENGLMN DWN ANGRN	.768	.117	.732	6.534	.000

a. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

Casewise Diagnostics^a

Case Number	Std. Residual	PGNWS KEU DRH	Predicted Value	Residual
1	-.579	4.00	4.1376	-.13757
2	-.158	4.10	4.1376	-.03757
3	-.158	4.10	4.1376	-.03757
4	-.287	4.20	4.2681	-.06807
5	-.545	4.20	4.3295	-.12948
6	-.836	4.20	4.3986	-.19857
7	-.707	4.10	4.2681	-.16807
8	-.707	4.10	4.2681	-.16807
9	-1.034	3.70	3.9456	-.24565
10	-.647	3.60	3.7537	-.15373
11	-.647	3.60	3.7537	-.15373
12	-.938	3.60	3.8228	-.22282
13	-.938	3.60	3.8228	-.22282
14	-.192	3.90	3.9456	-.04565
15	.297	4.40	4.3295	.07052
16	.331	4.60	4.5214	.07860
17	.752	4.70	4.5214	.17860
18	.752	4.70	4.5214	.17860
19	.752	4.70	4.5214	.17860
20	-.511	4.40	4.5214	-.12140
21	-.511	4.40	4.5214	-.12140
22	-1.353	4.20	4.5214	-.32140
23	-1.353	4.20	4.5214	-.32140
24	-1.353	4.20	4.5214	-.32140
25	-1.583	3.70	4.0762	-.37615
26	-.776	3.70	3.8842	-.18424
27	.325	3.90	3.8228	.07718
28	1.397	4.60	4.2681	.33193
29	2.368	4.70	4.1376	.56243

30	2.368	4.70	4.1376	.56243
31	.780	4.20	4.0147	.18526
32	.359	4.10	4.0147	.08526
33	.521	4.20	4.0762	.12385
34	.976	4.50	4.2681	.23193
35	.427	4.50	4.3986	.10143
36	1.784	4.50	4.0762	.42385
37	.066	3.90	3.8842	.01576
38	.780	4.20	4.0147	.18526
39	.780	4.20	4.0147	.18526

a. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

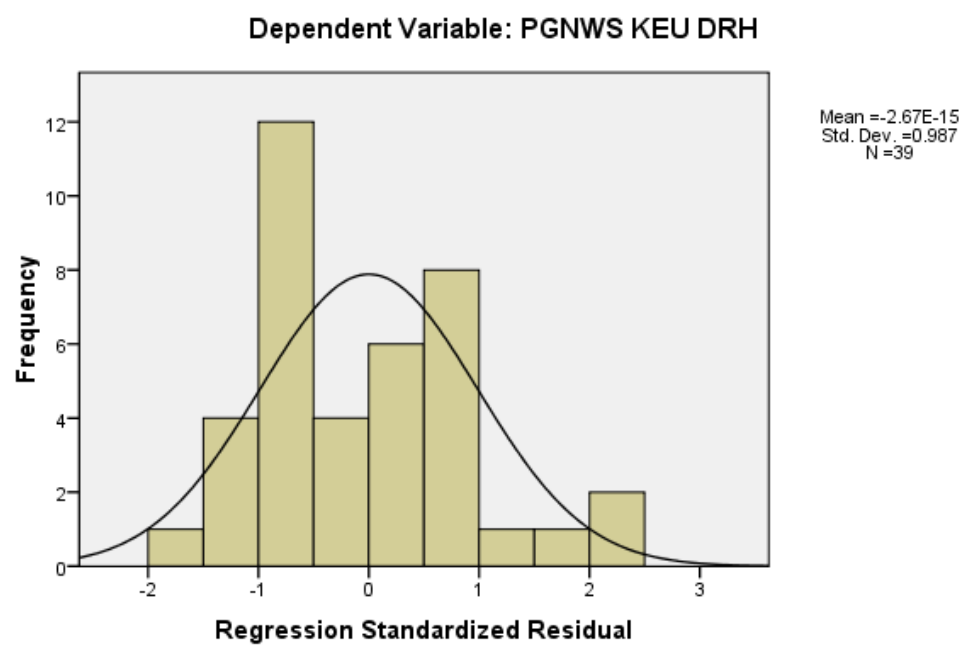
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.7537	4.5214	4.1821	.25180	39
Std. Predicted Value	-1.701	1.348	.000	1.000	39
Standard Error of Predicted Value	.039	.076	.052	.012	39
Adjusted Predicted Value	3.7712	4.5469	4.1843	.25099	39
Residual	-.37615	.56243	-6.46207E-16	.23441	39
Std. Residual	-1.583	2.368	.000	.987	39
Stud. Residual	-1.608	2.400	-.005	1.009	39
Deleted Residual	-.38790	.57772	-.00222	.24538	39
Stud. Deleted Residual	-1.645	2.576	.004	1.038	39
Mahal. Distance	.031	2.893	.974	.882	39
Cook's Distance	.000	.078	.023	.025	39
Centered Leverage Value	.001	.076	.026	.023	39

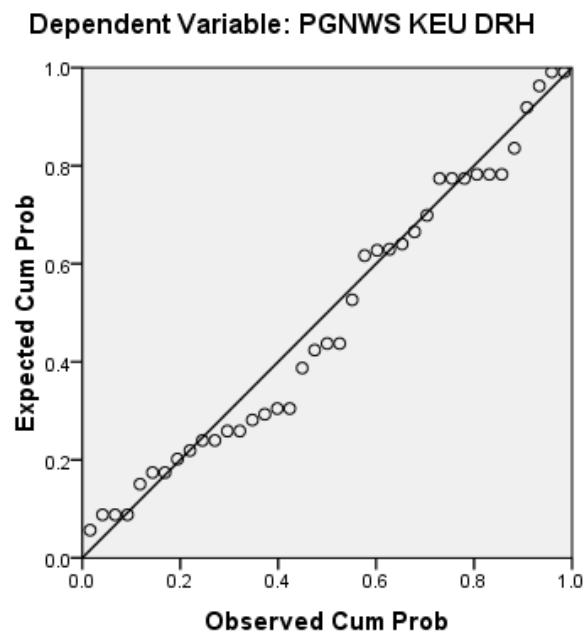
a. Dependent Variable: PGNWS KEU DRH

Charts

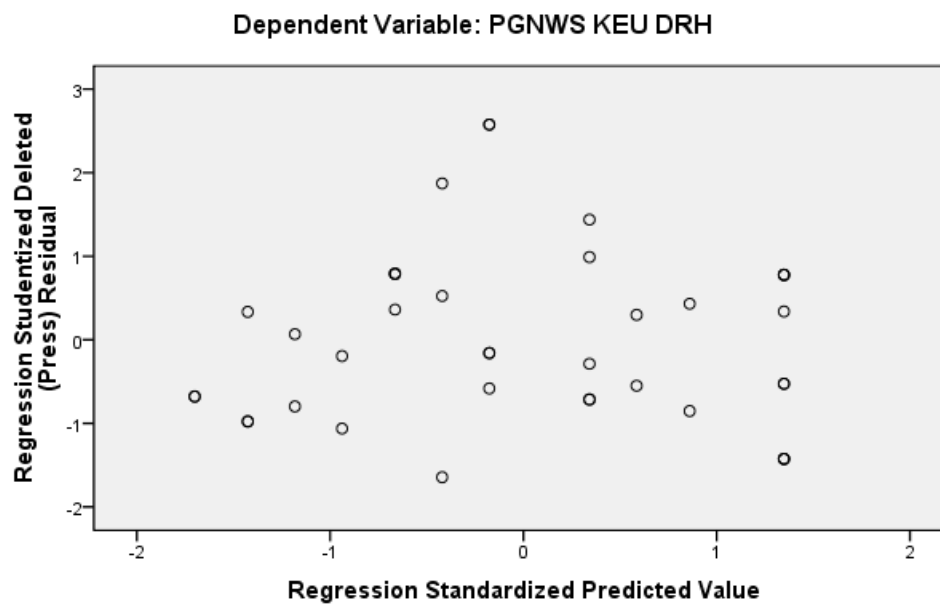
Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Scatterplot

